

## Fungsi Partai Politik Menurut Pandangan Sosiologi Politik Dalam Masyarakat

Niken Tri Prasetyowati<sup>1</sup>, Anita Trisiana<sup>2</sup>, Dany Satria Aji<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Slamet Riyadi Niken Tri Prasetyowati, Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Surakarta, Indonesia

Anita Trisiana, Dosen Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Surakarta, Indonesia

Dany Satria Aji, Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Surakarta, Indonesia

Nikentp5@gmail.com; anita.trisiana@gmail.com; danysatria112@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 05 Januari 2021 Revisi : 30 April 2021 Dipublikasikan : 06 Juni 2021	Semua lapisan masyarakat sangat familiar dengan forum politik ini. Apalagi menjelang pemilu, calon sukarelawan dan parpol akan berbondong-bondong membuat baliho pendukung untuk sepasang proposal dari salah satu partai. Menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang pada hakikatnya berbangsa, yang terdiri dari sekumpulan warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan aspirasi dan keinginan anggota, masyarakat, negara dan negara, serta kepentingan politik semua partai. . Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang stabil dan rapi yang mana terdiri dari sekelompok orang yang berkeinginan memiliki kesamaan aspirasi, cita-cita, dan juga kesamaan ideologi tertentu. Komitmen untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan melalui pemilu guna untuk mencapai alternatif kebijakan dan atau rencana. Maka dari itu mereka telah dikompilasi.
<b>Kata kunci:</b> Element Masyarakat Pemilu Partai Politik	<b>ABSTRACT</b> <i>Functions of Political Parties According to the Sociological View of Politics in Society. All layers of society are very familiar with this political forum. Especially before the election, volunteer candidates and political parties will flock to make supporting billboards to support a proposal from one of the parties. According to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties, is an organization consisting of a group of Indonesian citizens based on the aspirations and desires of members, society, state and state, as well as the political interests of all parties. . Maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. In general, a political party is a stable and neat organization consisting of a group of people who wish to have certain aspirations, ideals and ideology features. seeking power through elections to achieve alternative policies and plans. Therefore they have been compiled.</i> Keywords:
<b>Keywords:</b> Community Element Election Political Party	

Copyright © 2021 (Niken Tri Prasetyowati, Anita Trisiana, Dany Satria Aji). All Right Reserved

### Pendahuluan

Salah satu wujud keterlibatan dalam pemilihan umum atau biasa di sebut (pemilu). proses politik pada masyarakat yaitu Pemilihan dapat di artikan salah satu cara

warga negara untuk andil dalam menentukan sosok atau leadership pemimpin, yang akan menguasai negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ketika demokrasi lebih luas dari orang-orang di dunia dan pada saat yang sama mendapat perhatian lebih, maka daripada itu penyelenggaraan daripada pemilu yang bersifat demokratis menjadikan salah satu syarat yang penting didalam melaksanakan pembentukan daripada kepemimpinan disebuah Negara. Pemilu mempunyai fungsi yang utama yaitu untuk menghasilkan sebuah ke pemimpin yang benar - benar sangat mendekati daripada kehendak dan juga harapan daripadapada rakyat. Oleh karenanya maka dari itu, pemilu adalah merupakan salahsatu sarana dari legitimasi kekuasaan.

Pemilu bisa di katakan menjadi demokratis sekaligus aspiratif jika apabila memenuhi beberapa beberapa persyaratan. Yang ke satu yaitu, sudah seharusnya pemilu mempunyai sifat yaitu kompetitif, yang artinya peserta daripada pemilu seharusnya otonom dan bebas. Yang Kedua yaitu, pemilihan umum sendiri di selenggara kan secara berkala, yang artinya pemilihan umum seharusnya di selenggara kan Secara teratur dan jelas pada interval tertentu. Kemudian yang Ketiga adalah, pemilihan umum seharusnya inklusif, yang berarti seluruh kelompok didalam masyarakat sendiri harus memiliki peluang sama rata bagi yang ikut berpartisipasi didalam pemilu. Tiada satupun kelompok diperlakukan yang diskriminatif ataupun berbeda didalam sebuah proses dalam pemilu. Kemudian yang Keempat, pemilihan sendiri diharuskan diberi sebuah keleluasaan didalam mendiskusikan danjuga mempertimbangkan pilihan yang alternatif dan secara bebas, tiada berada didalam bawah tekanan dari segi manapun, dan begitu pula akses dalam mendapatkan suatu informasi yang sangat luas juga. Yang Kelima yaitu, bagi penyelenggara dari sebuah pemilu yang harus independen dan tidak memihak.

Di dalam pilar demokrasi sebagai kedudukannya, peran yang dimiliki oleh partai politik atau bisa disebut PARPOL didalam sebuah sistem politik bertingkat nasional yaitu merupakan suatu wadah dalam menyeleksi

figur ataupun tokoh pemimpin nasional serta wilayah. Pengalaman menggelar rangkaian pemilihan kepala daerah dan nasional melalui pilkada telah memungkinkan parpol berhasil menjadi pilar demokrasi. Banyak kalangan, termasuk kelompok internasional, percaya bahwa Pemilu 2004 sangat sukses. Melalui refleksi semacam ini, dapat dikatakan bahwa sistem politik negara sudah mulai ditinjau kembali sesuai dengan tatanan negara dan kehidupannya, termasuk pembentukan partai politik.

Status partai politik telah mengalokasikan sejumlah besar sumbangan untuk sistem politik nasional, terutama dalam perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Jika kemampuan dan kinerja partai dapat ditingkatkan, hingga perihal ini hendak mempengaruhi besar terhadap kenaikan mutu demokrasi dan juga kinerja pada sistem politik. Maka Oleh karenanya sehingga kedudukan partai politik (PARPOL) butuh di tingkatkan pada kapasitas, mutu, serta kinerjanya pula supaya bisa mewujudkan aspirasi serta kehendak rakyat serta tingkatkan mutu demokrasi. Saat ini sedang dirampungkan setidaknya lima paket: UU di bidang politik buat menyambut pemilihan umum atau PEMILU atau pemilihan umum pada tahun 2009. daripada lima paket UU tersebut, maka setidaknya sukses dituntaskan ada tiga UU, ialah UU No. 22 Th 2007 tentang Penyelenggara PEMILU, UU No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik, serta UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilihan Universal Anggota (DPR), Dewan Perwakilan Wilayah, serta DPR Wilayah. Kemudian Sisanya, ialah UU tentang Pemilihan Universal Presiden serta WAPRES atau Wakil Presiden serta UU tentang Lapisan serta Peran MPR, DPR DP Wilayah, serta DPR Wilayah hendak lekas di diskusikan di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat kepada masa persidangan selanjutnya

Bagi Miriam Budiarjo, definisi daripada partai Politik atau biasa di sebut PARPOL merupakan suatu Organisasi pada Politik dibangun buat kepentingan universal. Jadi daripada mari bisa juga dikatakan kalau PARPOL atau Partai Politik itu merupakan suatu bentuk organisasi yang bernazar mencapai kekuasaan demi kepentingan

rakyat. Berdasar definisi ini Miriam Budiardjo membagi kedudukan serta guna partai Politik jadi:

Fasilitas Komunikasi Politik maksudnya partai Politik bertugas menyalurkan seluruh aspirasi warga, serta seluruh aspirasi tersebut hendak ditampung supaya satu tujuan. Fasilitas Sosialisasi Politik maksudnya partai Politik bertugas bagaikan pemberi proses pendidikan kekepada warga menimpa fenomena Politik yang terjalin.

Fasilitas Recruitment Politik maksudnya partai Politik bertugas buat merekrut orang-orang yang berbakat dalam bidang Politik buat masuk ke dalam aktivitas Politik. Fasilitas Pengatur Konflik maksudnya Partai Politik berupaya buat meredam gejolak yang terjalin akibat pertentangan serta perbandingan komentar dalam warga masyarakat. Partai politik berangkat daripada asumsi kalau dengan membentuk sebuah wadah atau bentuk organisasi mereka yang dapat menyatukan perkumpulan orang-orang yang memiliki benak seragam sampai benak benak serta orientasi mereka dapat dikonsolidasi” (Maariam Budiardjo 2008).

Serta baginya pula, guna partai Politik ini baru bisa terpenuhi di dalam sistem Demokrasi, karena di dalam sistem otoriter serta kediktatoran, partai Politik, hendak bisa diucap bagaikan Kelompok Birokrasi serta bukan bagaikan kedudukan partai Politik yang sebetulnya.

Jadi begitulah guna serta kedudukan daripada suatu partai Politik, yang dimana bila salah satu di antara itu tidak terlaksana dengan baik, hingga mereka tidak hendak dapat diucap bagaikan partai Politik.

Oleh karenanya hingga dari itu upaya yang bisa dicoba buat tingkatkan partisipasi warga dalam politik wajib bersumber pada kekepada analisis serta argumentasi yang kokoh. Perihal tersebut disebabkan terdapatnya sebagian kebutuhan demi mewujudkan langkah yang strategis buat tingkatkan kuantitas serta mutu Aktivitas politik warga negara peserta pemilu dan perbaikan sistem pemilu bergerak ke arah yang lebih baik. Artinya, dalil dan analisis kelahiran dan kreasi tentu saja didasarkan pada inisial, metode atau kerangka kerja yang

lebih sesuai untuk menangkap dinamika partisipasi politik, dan kedua, didasarkan pada sikap sangat peka terhadap dinamika internal. Bidang ekonomi, administrasi, politik, sosial dan budaya (Daud Meter. Liando 2016).

Dengan terdapatnya pemahaman itu, hingga totalitas daripada segala ini Berdasarkan pengertian tersebut, seluruh isi dari semua laporan ini telah dipilah secara sistematis, dari awal kita harus membahas esensi partisipasi warga dalam partisipasi politik di negara yang bersifat demokrasi. Pemilihan umum yakni sistem atau mekanisme yang digunakan dalam sistem demokrasi untuk melahirkan *leader* dan atau petinggi pemerintah. Maka, yang menjadi prinsip dasarnya adalah layaknya warga negara, secara sadar ikut serta dalam pemilu yang harus diselenggarakan antar warga negara. Tujuan daripada dialog kepada bagian ini merupakan buat berupaya menempatkan hakekat kepada warga( pemilih) dalam pembuatan serta pertumbuhan sitem pemerintahan yang bertabiat demokratis. Yang berikutnya hendak diungkapkan serta dibuka kepada langkah- langkah yang selanjutnya sebagaimana tata cara studi serta alu dalamr analisis yang hendak digunakan dalam studi ini. Bagian ini hendak tercipta daripadakepada pemahaman yang akademis kalau metodologi serta kerangkah analisis yang pas serta baik, hendak memastikan tingkatan daripada akurasi penemuan serta saran didalam studi ini.

Buat mengkonstruksi analisis yang pas serta Senantiasa berdiri di lingkungan (geopolitik dan sosial budaya ), hingga penelitian ini didasarkan pada pembahasan mendalam tentang latar belakang lingkungan yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Tujuannya adalah memasukkan dimensi konteks seperti unit analisis yang terlibat dalam partisipasi pemilih dalam analisis pengaruh untuk membuat analisis yang lebih komprehensif. Setelah menyelesaikan prosedur analisis, proses menganalisis, serta latar belakang, tahap selanjutnya adalah menyoba menggali partisipan dari seorang pemilih dalam pemilihan legislatif serta pemilihan Pres dan Wapres yang berdasar pada hasil penyelidikan di outdoor. Untuk

memaparkan kesimpulan tersebut, saya berharap dapat mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai langkah selanjutnya bagi semua pihak.

Pemilu global adalah arena untuk membangun demokrasi perwakilan dan mengorganisir perubahan pemerintahan secara teratur. Untuk teori demokrasi sederhana (Schumpeterian), pemilu adalah arena untuk menampung persaingan (persaingan) antar pelaku politik demi memperebutkan kekuasaan. Keikutsertaan rakyat dalam politik untuk memastikan pilihannya; liberalisasi dari politik dan hak sipil dalam masyarakat. Demokrasi pula menekankan bahwa pemilu memberikan peluang kepada rakyat dan partai oposisi guna memberlakukan pengawasan dan keseimbangan pada partai yang berkuasa (partai yang berkuasa). Walaupun banyak yang menganggap konsep demokrasi minimalis, praktik demokrasi minimalis ini telah membentuk sistemnya untuk menentukan / mengisi posisi publik diseluruh negara-negara demokrasi. Yang berarti pemilihan umum sudah menjadi mekanisme dan telah lembaga universal pula dalam bentuk sistem politik pada negara demokrasi.

Dahulu terdapat bagian yang sudah disinggung kalau terdapat sebagian pemikiran berbeda yang secara mendasar antara PARPOL atau partai politik dinegara yang bersifat demokratis serta dinegeri yang juga bersifat otoriter. Perbandingan daripada pemikiran tersebut sudah ber implikasi terhadap penerapan tugas ataupun guna daripada partai tiap- tiap negeri.

Di negeri yang demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan gunanya cocok dengan harkatnya dikala kelahirannya, ialah bagaikan wadah untuk masyarakat negeri demi berpartisipasi dalam mengendalikan serta mengelola kehidupan dalam bernegaraden memperjuangkan kepentingannya kekepada para penguasa. Kebalikannya di negeri yang bersifat otoriterr, sebuah partai itu tidak bisa membuktikan harkat nya, namun lebih sedikit banyak melaksanakan kehendak dari pada penguasa (Mariam Budiardjo 2008).

Terlebih bila tidak terdapat re- generasi dalam partai Politik( fasilitas Recruitment Politik), malah membuat konflik( fasilitas Pengatur Konflik), ataupun memaksakan kehendak kepada rakyat( fasilitas Sosialisasi Politik), dan memakai rakyat bagaikan perlengkapan Politik( fasilitas Komunikasi Politik), hingga bisa dipertanyakan Guna Partai Politik&nbsp;Fungsi parpol bagaikan fasilitas:

1. Parpol bagaikan anjuran Partai politik ibarat saran untuk komunikasi antar sebuah politik. Komunikasi politik adalah proses transfer data politik dari pemerintah ke publik dan warga negara dari politik ke pejabat tinggi atau pemerintah. Parpol disini berperan buat meresap, menghimpun( mencerna, serta menyalurkan daripada aspirasi politik warga dalam menetapkan dan juga merumuskan sesuatu peraturan atau kebijakan. Sebagai contoh: permisalan di lingkungan sebuah universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa juga di sebut BEM itu ibarat Parpol. Bila terdapat saran atau masukan aspirasi maupun permasalahan yang dituntut mahasiswa, misalnya revisi sarana dan prasarana kampus. pada kala itu terjalin interaksi antara mahasiswa serta badan eksekutif yang membahas menimpa minimnya sarana universitas. Berikutnya Badan Eksekutif mengantarkan aspirasi atau sebuah tuntutan mahasiswa terhadap birokrat. Interaksi diantara mahasiswa( warga), badan eksekutif ( parpol) serta pihak universitas ( pemerintah), ialah sesuatu komunikasi. Badan eksekutif sebagai sesuatu fasilitas komunikasi antara kedua belah pihak yakni mahasiswa serta universitas. Pada kehidupan berpolitik sesuatu negeri permisalan tersebut bisa ibaratnya mahasiswa tersebut warga, Badan Eksekutif tadi adalah Partai politik, serta pihak universitas itu Pemerintah.
2. Partai Politik (Parpol) bagaikan fasilitas atau wadah untuk sosialisasi berpolitik. Kemudian pengertian dari Sosialisasi politik merupakan sebuah proses pembuatan perilaku serta orientasi pada sebuah politik menimpa sesuatu fenomena dari sebuah kehidupan politik baru

dirasakan sesuatu negeri. Proses ini di informasikan lewat pembelajaran dari sebuah politik. 2. Sosialisasi yang diupayakan parpol kepada warga berupa pengenalan rencana partai. Oleh karena itu, warga diharapkan dapat mengklasifikasikan parpol tersebut sebagai hak pilih universal.

Sebagai contoh yakni pada sebuah penyampaian rencana partai ke kampanye pra-pemilihan. Kejadian ini merupakan salah satu kegunaan Partaipolitik sebagai alat atau wadah fasilitas sosialisasi politik.

3. Partai politik bagaikan fasilitas rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses pilih serta penarikan seorang ataupun kelompok untuk melakukan beberapa kedudukan dalam sebuah sistem pada politik maupun pemerintahan. Atau pun bisa dikatakan sebuah proses pilih serta penarikan seorang ataupun kelompok untuk menduduki sesuatu jabatan maupun sebagian jabatan pada sebuah politik maupun dapat mewakili partaipolitik tersebut dalam sesuatu bidang tertentu. Rekrutmen pada politik tersebut manfaatnya untuk mencari banyak orang-orang yang barangkali berkompeten ataupun dapat berbakat untuk ikut serta berperan aktif dalam aktivitas politik. Contoh: sebagai contoh misalnya semacam pada contoh sebuah komunikasi politik yang tadi, dilingkungan kampus. Badan eksekutif mahasiswa hendak mengubah pimpinan dan para anggotanya pula dikarenakan masa jabatannya sudah berakhir atau telah purna. Kemudian sebuah proses dari Badan eksekutif tersebut dalam merekrut pimpinan serta para anggota badan eksekutif baru ialah sebuah proses yang bisa disebut dengan rekrutmen. Pemilihan melalui rekomendasi dan seleksi atau melalui pemilihan. Demikian pula, partai politik juga berharap menemukan, memilih, dan mengangkat Anggota baru memegang posisi partai atau pemerintahan, atau berpartisipasi dalam pemilihan.
4. Partai politik seperti saran dari pengelola konflik. Penyelenggara konflik harus mengatur konflik berdasarkan kebijakan

yang coba diambil pemerintah (dalam hal ini, bandingkan berbagai komentar atau perselisihan pribadi). Pengendalian konflik tersebut dapat pula dilakukan dengan metode diskusi, menampung dan serta berikutnya bawa kasus tersebut kepada tubuh wakil rakyat ( Camat / DPRD / DPR) buat memperoleh keputusan dari sebuah politik yang menimpa kasus. Contoh: di sebuah warga terjalin permasalahan menimpa kenaikan harga sebuah bahan bakar minyak pada saat dicoba oleh pemerintah. Kebanyakan terjalin demo atau turun aksi yang menentang kebijakan dan peraturan yang di buat tersebut. Pada permasalahan ini partai politik bagaikan salahsatu seorang perwakilan dalam warga didalam tubuh wakil rakyat (DPRD/DPR), menyelenggarakan diskusi bersama-sama warga yang tertimpa peningkatan harga bahan bakar minyak itu. Partai politik dalam perihal tersebut berperan bagaikan mengatur masalah tersebut dengan metode mengantarkan kepada wakil rakyat atau pemerintah yang berguna untuk memperoleh sesuatu vonis yang bisa dikatakan bijak bagi yang terkena dampak menimpa peningkatan harga Bahan bakar minyak tersebut.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Program penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam, dimana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan riset kuantitatif merupakan riset ini berangkat daripada informasi, menggunakan teori yang terdapat bagaikan bahan penjelas serta berakhir dengan suatu teori.

1. Riset kualitatif merupakan pendekatan kualitatif memandang kenyataan ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pemikiran holistik.
2. Periset memakai riset kualitatif sebab periset hendak memakai sesuatu kerangka teori, gagasan para pakar, ataupun uraian periset bersumber pada pengalamannya yang setelah itu dibesarkan jadi permasalahan- permasalahan beserta

pemecahannya yang diajukan buat mendapatkan pembenaran( verifikasi) dalam wujud sokongan informasi empiris di laporan.

Dalam riset ini ada bermacam pendekatan dalam ilmu sosial serta ilmu politik buat menguasai fenomenal sosiologi politik yang terjalin di dalam warga. Tom Bottomore mendefinisikan Sosiologi politik bagaikan ilmu yang fokus kepada aspek kelas ataupun stratifikasi sosial, gerakan sosial, dan aspek politik yang lain. Dalam gunanya partai politik bagaikan wadah menampung aspirasi warga serta bagaikan perwakilan rakyat dalam mengantarkan harapan serta kemauan.

Jajak yang ada di dalamnya ialah deskripsi fenomenologis yang berkaitan dengan guna partai politik bagi pemikiran sosiologi politik dalam warga. Perihal ini didapatkan daripada dialog langsung ataupun tidak langsung yang diperoleh daripada oknum pelakon serta pihak- pihak yang mengenali seluk beluk menimpa guna partai politik. Fenomena tersebut setelah itu didekati serta dikaji daripada perspektif sosiologi politik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Definisi daripada Ilmu Politik merupakan sebuah ilmu yang menekuni bidang politik ataupun politics dan atau kepolitikan. Sementara Mariam Budiardjo 2008 mengatakan bahwa politik merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan. Dengan demikian kita bisa merumuskan kalau definisi daripada politik merupakan usaha buat menggapai sesuatu warga berbentuk harapan, kemauan serta kehidupan warga yang lebih baik daripadakepada yang saat ini lagi dialami. Terdapat sebagian perihal yang menuju kepada berartinya buat menekuni Sosiologi Politik.

Awalnya , Sosiologi menolong para sarjana politik untuk memahami struktur, gaya hidup dan latar belakang sosial dari berbagai kelompok masyarakat maupun golongan. Kedua, Sosiologi politik ialah sebuah ilmu yang menekuni ikatan antar negeri serta warga. Ketiga, sebab sosiologi bisa menolong ilmu- ilmu lainnya dalam

meringankan beban warga, kemanusiaan serta negeri.

Pemikiran Max Weber Tentang Sosiologi Politik Max Weber mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Karl Marx dalam menganalisis kelas sosial di warga. Bila Marx lebih menonjolkan aspek ekonomi bagaikan aspek penentu kelas sosial, hingga Weber meningkatkan faktor- faktor non-ekonomis yang memastikan kelas sosial di warga.

Faktor-faktor yang terlibat antara lain: status sosial dalam masyarakat dan kekuasaan yang dipunyai oleh orang ataupun kelompok tertentu dalam warga masyarakat. Masalah kelas sosial dan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan penelitian sosiologi politik saat ini. Weber juga mendefinisikan politik sebagai alat perjuangan untuk bersama-sama menjalankan politik kekuasaan, atau alat perjuangan untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan (Sahid, 2011: 15). Dalam Ilmu Sosial, sosiologi merupakan yang sangat mendasar serta universal. Sosiologi menolong para sarjana politik buat berupaya menguasai latar balik, struktur, serta pola pada kehidupan sosial di seluruh kelas serta kelompok warga (Mariam Budiardjo 2008). Politik merupakan masalah sebuah pilihan,yang mengaitkan alternatif kebijakan publik serta alternatif untuk orang- orang di bermacam posisi politik (Ramlan Surbakti 2020).

Karena kebutuhan publik biasanya lebih besar daripada kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pilihan kebijakan menjadi prioritas utama. Begitu pula dengan jumlah orang yang mau merambah jabatan politik umumnya jauh melebihi jumlah posisi yang ada, sehingga opsi siapa yang hendak berprofesi tergantung pada suara atau kekuasaan mayoritas. Maka dari itu, pengambilan keputusan memilih alternatif menjadi pejabat publik atau bisa juga dengan pengambilan keputusan politik dengan memilih kebijakan alternatif menjadi kebijakan publik. Yang juga menjadi permasalahan pilihan kebijakan publik yakni politik lokal , dengan melibatkan rakyat untuk menjadi pejabat publik merupakan sebuah jalan alternatif. Namun pilihan kebijakan dan pilihan masyarakat tidak hanya melibatkan

daerah, yaitu provinsi, bupati / perkotaan, dan perdesaan, tetapi juga inisiatif, diskusi, dan keputusan.

(Pilih alternatif kebijakan dan alternatif masyarakat) diselesaikan oleh penduduk lokal. Meski di era orde baru, politik lokal sebenarnya belum ada, meski ada juga kebijakan publik dan keputusan pejabat pemerintah (memilih alternatif) tentang , daerah / kota, desa dan juga provinsi (atau sebutan yang lain ) saat itu. Politik lokal dulu di masa OrBa tidak ada, Sebab, keputusan dan juga pembahasan tentang kebijakan alternatif dan peran alternatif tak dilakukan oleh masyarakat sekitar, akan tetapi oleh pemerintah pusat atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Dengan menggunakan konsep teori sosiologis, sarjana politik bisa mengetahui sejauh apa struktur dan tingkatan sosial dipengaruhi atau terpengaruh oleh keputusan kebijakan, karakteristik serta karakteristik legitimasi politik, sumber otoritas politik (sumber otoritas politik), dan masyarakat. *Social control* serta perubahan sosial.

Baik sosiologi dan ilmu politik belajar tentang negara. Namun sosiologi seringkali menganggap negara sebagai sebuah media kontrol sosial. Gambaran sosiologis, masyarakat yang sederhana dan kompleks selalu cenderung pada suatu bentuk, proses kontrol formal dan informal, tatanan atau metode kontrol muncul.

Hubungan antara ilmu politik tak bisa dibatasi pada filsafat maupun sejarah ,akan tetapi juga mencakup dari ilmu-ilmu sosial. *Political Science* adalah dapat dikategorikan menyeluruh mencakup *social sciences* dan sangat dekat terhadap anggota ilmu sosial yang lain. Serta hukum, sosiologi, ekonomi, antropologi psikologi sosial dan geografi sosial. Melalui beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan, sosiologi memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan politik. Peran ini terutama menyediakan data hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi pembangunan dan pelaksanaan.

Menurut UU No. 8 Tahun 2012, Tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Dewan Perwakilan

Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatur Pemilu atau arti pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana LUBER JURDIL untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Latihan kedaulatan. Ini adalah lembaga yang berdemokrasi.

Salah satu wujud bentuk negara demokrasi ialah partisipasi politik masyarakat. Biasanya otoriter dan sentralisasi apabila negara tanpa partisipasi politik dalam masyarakat. Pengalaman daripada politik di era OrBa menunjukkan bahwa pmungutan keputusan politik sewenang-wenang apabila menyusun dan merencanakan sebuah peraturan/kebijakan. Akibat dari itu, keputusan diambil seringkali tak memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat yaitu wujud swasembada yang meliputi partisipasi, eksistensi, gagasan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan pengawasan terhadap diri sendiri saat melaksanakan kebijakan.

Menurut Conyers (1994: 154), partisipasi masyarakat sangat penting karena tiga alasan utama. Yang kesatu, partisipasi masyarakat adalah sarana untuk memperoleh suatu informasi tentang kondisi, sikap dan kebutuhan warga masyarakat setempat, jika tidak maka rencana dan proyek pembangunan akan gagal. Kedua, jika masyarakat merasa dilibatkan dalam proyek atau rencana pembangunan, mereka akan lebih percaya pada mereka, Karena mereka akan lebih memahami proyek dan rasa kepemilikannya. Yang Ketiga, sebagian orang percaya bahwa jika orang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya sendiri, ini adalah hak demokratis. Dapat dirasakan bahwasannya mereka juga berhak ikut serta memberi sebuah kritik-saran guna menentukan jenis pengembangan yang dilakukan nantinya.

Sebuah Partisipasi politik dari warga masyarakat dalam pemilihan umum atau disebut pemilu pula amat ditentukan untuk kemajuan serta arah suatu negara. Kualitas daripada sebuah partisipasi politik bisa pula amat sangat menentukan apa kah orang yang menyelesaikan seluruh hak pilihnya wajib dapat memilih, apakah masyarakat dapat

menikmati hak untuk memilih atau kenyamanan hak untuk memilih, dan apakah masyarakat dapat mendasarkan keyakinan dan keyakinannya pada calon terpilih. Pilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.

Masalah pilkada sebenarnya tidak terbatas pada teknis sering nya proses menemui banyak penyimpangan, namun persoalan utamanya adalah hasil atau substansi pemilihan umum jauh dari yang diharapkan. Hasilnya yang terakhir dari pemilu sebenarnya adalah lahirnya pemimpin dianggap ideal. Faktanya, adalah sampai sekarang ini, selain proses dari pelaksanaan yang amatir dan juga dianggap tidak profesional, para legislator yang ter-pilih melalui proses pemilihan umum masih merasa kualitasnya menurun atau rendah, daripada keahlian kepemimpinan yang terbatas, dan persoalan hukum yang belum mereka pimpin. Kemajuan dilakukan sampai mereka mengakhiri masa jabatan mereka.

Salah satu penyebab lemahnya pemilu lebih karena regulasi itu sendiri. Terkait pemilihan (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat, UU DPD dan DPRD No 8 Thn 2012 mengatur bahwa syarat menjadi calon legislatif adalah fotokopi KTP dan paspor calon yang masih berlaku di luar negeri. Termasuk juga surat pernyataan dari Tuhan Yang Maha Esa yang berusia 21 tahun, mampu fasih dalam hal bicara, dalam menulis dan dalam membaca kedalam bahasa Indonesia, serta setia juga kepada 5 Dasar Negara, cita-cita Undang - undang dasar 1945, dan pengumuman 17-8-1945. Juga harus disertai dengan fotokopi surat keterangan yang belum pernah dipatuhi hukuman, surat keterangan dari penjara yang menandakan calon telah menyelesaikan pidana sesuai putusan dari Instansi resmi dan memperoleh surat yang menyatakan sehat daripada jasmani serta juga rohani dan juga surat keterangan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang atau disebut SKBN oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah. Kemudian Calon harus juga melampirkan surat keterangan atau barangbukti bahwa ketua PPS terdaftar juga sebagai pemilih dan surat niat bekerja penuh waktu, Kep.Daerah dan Wakil Kep.Daerah, Polisi Republik Indonesia, anggota (TNI)Tentara

Nasional Indonesia, (BUMN)Badan Usaha Milik Negara / surat pengunduran diri atau SPD yang tak bisa dibatalkan. BUMD. Calon dpr&dprd menjadi calon oleh para calon parpol berbeda dan disertai pada surat persetujuan daripada pemimpin partai semula, pelaksana pemilu, kades, dan perangkat didesa. Ini juga termasuk keengganan untuk bertindak sebagai akuntan, pembela HAM, Pejabat pembuat akta tanah, notaris dan Penyedia barang dan penyedia layanan jasa, pernyataan ini tak akan berfungsi menjadi pejabat negara / wilayah lain pada saat yang bersamaan. Persyaratan lainnya adalah fotokopi KTA partai politik, surat pernyataan yang bisa dicalonkan untuk satu badan perwakilan saja serta satu badan perwakilan Daerah pemilihan, dengan resume, dan 5 foto berwarna terbaru ukuran 4x6. Persyaratan di atas dibatasi pada persyaratan normatif calon legislatif yang bersangkutan, Tidak ada persyaratan substantif. Faktanya, undang-undang Itu tidak dirancang untuk menyaring dan melatih para pemimpin yang berkualifikasi. Mengembangkan pemimpin berkualitas baik, peraturan harus di mulai daripada diatur. Harus ada aturan yang tidak hanya mencakup persyaratan formal yang disebutkan di atas, tetapi juga persyaratan khusus, terutama yang terkait dengan pengalaman kepemimpinan.

Karena itu, peserta pemilu lebih cenderung mengikuti calon yang belum memiliki jiwa kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk bagi pengusaha bermodal besar. Maka dari itu, “Undang-undang Pemilu” dan diperlukan pengesahan amandemen dengan syarat khusus calon legislatif, yaitu pengalaman dari bentuk kepemimpinan, seperti halnya pengalaman kepemimpinan pemerintah, ormas, partai politik, perusahaan dan atau pengalaman kepemimpinan lainnya yang dapat meningkatkan pengalamannya sebagai legislator. Rancangan undang-undang pemilu mereka harus dibatasi bagi mereka memiliki pengalaman yang paling sedikit untuk menjadi legislator. Selain dari diperkuatnya regulasi dari pemilu, ini soal lain. perlu ditingkatkan yaitu penguatan dari kelembagaan pelaksana pemilu.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa rendahnya kualitas proses pelaksanaan pemilihan umum lebih disebabkan oleh minimnya pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, terutama di tingkat panitia. Banyak penyelenggara pemilu di berbagai tingkat ini berstatus Pegawai negeri sipil, dan mekanisme rekrutmennya melalui partisipasi (disarankan) aparat desa, sehingga usianya masih sangat muda sehingga dicampuri oleh kekuatan politik yang bersaing. Apalagi salah satu pesaing pilkada pasca konflik adalah kepala daerah saat ini. Dampaknya adalah banyak sekali pelanggaran yang terjadi dikarenakan sebuah persekongkolan atau intimidasi antara penyelenggara dan pasukan ketimbang politik.

Pelaksanaan pada tingkat ini biasanya tidak mempunyai pengalaman terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Rekrutmen selama proses pemilihan sudah berlangsung, yang jadi penyebab salahsatu terbatasnya pengalaman. Dalam kasus pemungutan suara sudah dilakukan di Tempat pemilih suara, namun penyelenggara tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti petunjuk teknis penyelenggara pemilu (Bimtek), sehingga tugas pokok dan fungsinya dijalankan sesuai dengan itu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi adalah rendahnya sosialisasi dari pihak panitia ad hoc terhadap masyarakat dalam hal pemungutan suara kepada masyarakat. Sebagian masyarakat masih meyakini aturan pemilihan merupakan penunggu undangan tertulis daripada pihak panitia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salahsatu alasan mengapa warga tak memilih di Pemilihan umum tahun 2014 adalah karena ketidak ada kepercayaan kepada caleg, ketidakpercayaan terhadap janji kampanye, dan ketidaktertarikan terhadap visi dan misi yang diajukan hingga masyarakat memilihnya. Atau perasaan tidak nyaman akan perubahan.

Informan menilai proses rekrutmen caleg yang dialami pada beberapa pemilihan umum di Indonesia sangat memprihatinkan. Partai politik sepertinya tidak terlalu memperdulikan

kemampuan dan profesionalisme kandidat saat melakukan rekrutmen, yang biasanya dianggap berpeluang besar untuk terpilih. Motivasi parpol adalah bahwa kebesaran partai tidak ditentukan oleh kuliata, akan tetapi ditentukan dari jumlah perolehan suara atau kursi pada saat berlangsungnya pemilu. Selain itu, beberapa politisi harus puas dan menjadi dambaan setiap parpol. Secara nasional, Papol harus menggunakan angka 3,5% sebagai syarat ambang batas bagi parlemen untuk mendapatkan suara. Parpol juga harus nekat memenangkan 25% suara sah bangsa sebagai syarat pencalonan parpol dalam pilihan presiden. Di wilayah daerah, parpol memperebutkan suara demi memperebutkan duapuluh persen kursi DPRD, dan memperoleh duapuluh persen suara hasil dari pemilu. Ini merupakan sebuah persyaratan demi bisa ikut menjadi calon kepala daerah tanpa harus bersekutu pada partai politik yang berbeda. Di sisi lain, parpol di daerah juga harus berjuang keras untuk mendapatkan suara terbanyak, karena untuk menjadi pemimpin pada dewan perwakilan rakyat daerah dibutuhkan parpol yang memperoleh suara yang paling banyak.

Fakta membuktikan bahwa inilah alasan mengapa parpol belakangan memprioritaskan perekrut Menjadi kandidat dengan peluang menang meski minim pengalaman menjadi pemimpin. Di tengah, sebagian besar rekrutan adalah seniman & pengusaha . Pada daerah ini lebih banyak perekrutan yaitu para keluarga dari pejabat atau pengusaha diluar dari daerah. Tentu saja, jika mereka memiliki skill dan pengalaman kepemimpinan, hal ini tidak menjadi masalah. Namun jika mengacu pada hasil Pemilu 2014, masih banyak pertanyaan seputar pengalaman kepemimpinan nepotisme serta dari pengusaha yang merupakan calon terpilih.

Rekrutmen Kader sebuah partai tak dianjurkan berjalan tiba-tiba, yang masuk akal, akan tetapi diawali dengan rencana yang siap serta berdasarkan kebutuhan dari organisasi.. Sebagai forum sekolah politik bagi anggotanya ialah tujuan dari dibentuknya organisasi partai politik dan melalui proses pendidikan haruslah bertahap, rekrutmen harus benar, profesional serta metode

penyeleksiani, dan tahap akhir juga melakukan tugas-tugas ini.

Promosikan anggota menjadi pejabat publik yang telah melalui proses pendidikan daripada politik. Untuk forum belajar politik, partai politik perlu belajar dan mengajar melalui kepemimpinan anggotanya dan lain sebagainya. Sehingga suatu saat nanti ketika anggota parpol terpilih menjadi pejabat pemerintah, akan ada aturan kepemimpinan yang bisa menguntungkan banyak orang.

Partai politik adalah sekelompok kelompok terorganisir. Terdiri dari perkumpulan dengan ideologi tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama sebuah partai adalah untuk mendapatkan kekuasaan atau status politik di suatu negara. Untuk mencapai tujuannya, partai politik menggunakan sarana konstitusional. Sebagai partai politik memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

### 3. Sebagai media perekrutan

Parpol adalah sekelompok atau individu yang memilih menjadi pemimpin. Pemimpin bisa menjadi pemimpin partai, atau pemimpin pemerintahan termasuk Pres dan wapres. perekrutan orang dan dilatih oleh parpol diharapkan menjadi pemimpin cakup.

### 4. Media pencegah konflik

Pada pemerintahan atau sistem di suatu negara, akan selalu ada orang yang memiliki pendapat berbeda. Untuk menghindari konflik, disini peran parpol harus dimampukan menampung perbedaan pandangan/isu lain-lain melalui dialog. Dialog itu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (Republik Demokratik Rakyat, Partai Demokrat, dan penjajah). Harapannya Dialog dapat menemukan keputusan politik yang sangat tepat bagi penyelesaian masalah atau persoalan tersebut.

## Simpulan

Definisi daripada Ilmu Politik merupakan sebuah ilmu yang menekuni bidang politik ataupun politics dan atau kepolitikan. Sementara. Dengan demikian kita bisa merumuskan kalau definisi daripada politik

## 1. Media komunikasi

Partai politik yaitu media untuk komunikasi diantara rakyat dengan pihak pemerintah atau masyarakat dan atau antara pemerintah dengan masyarakat. Parpol memenuhi keinginan rakyat, menghimpun informasi sekaligus meneruskannya kepada pihak pemerintahan. Melewati komunikasi semacam ini, pemerintah bisa lebih mudah memilih kebijakan dan kebijakan didalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Media sosialisasi

Parpol berperan dalam mensosialisasikan rencana berdasarkan sistem ideologis. Sosialisasi semacam ini merupakan salah satu bentuk promosi kepada seluruh parpol. Suatu bentuk promosi semua partai politik di masyarakat agar suatu saat bisa memilih partainya sendiri. Sosialisasi yang baik akan membuat orang lebih menyukainya dan memilih partai sebagai pemimpinnya. merupakan usaha untuk menggapai sesuatu warga berbentuk harapan, kemauan serta kehidupan warga yang lebih baik daripadakepada yang saat ini lagi dialami.

## Referensi

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustakim. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Khazanah Ilmu.